ACSET

Member PT United Tractors Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ACSET INDONESIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Acset Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa pada tanggal 8 April 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"). Sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut "Peraturan OJK No. 32"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat. Ringkasan risalah Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015, hari Rabu, berlokasi di Jakarta Pusat, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, The Energy Building Lantai 2 Soehanna Hall, sebagaimana tertuang di dalam Akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonesia Tbk nomor 53 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- tanggal Rapat : 8 April 2015
- tempat penyelenggaraan Rapat : Jakarta Pusat, The Energy Building Lantai 2 Soehanna Hall
- waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14.20 WIB – 15.11 WIB
- mata acara Rapat :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
 3. Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Direksi Perseroan serta Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2015-2016;
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Direktur	Hilarius Arwandhi
Direktur	Lukas Iwan Setiadi
Direktur	Herjadi Budiman
Direktur Independen	Wiltarsa Halim

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris	Bambang Widjanarko E.S.
Komisaris	Andi Anzhar Cakra Wijaya
Komisaris Independen	Robert Mulyono

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 363.719.345 saham/suara atau setara dengan 72,74% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
4. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat tetapi tidak ada Pemegang Saham yang bertanya.
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - Oleh karena ada Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa hanya untuk memenuhi ketentuan korum kehadiran saja, maka keputusan untuk seluruh agenda Rapat akan diambil dengan pemungutan suara;
 - Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 Peraturan OJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - Dalam proses perhitungan suara, para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atas usul tersebut diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) atas usul tersebut;
 - Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	363.719.345 suara / 100 %	-	-
Agenda 2	363.719.345 suara / 100 %	-	-
Agenda 3	362.907.045 suara / 99,78 %	812.300 suara / 0,22 %	-
Agenda 4	353.990.845 suara / 97,4 %	9.728.500 suara / 2,6 %	-
Agenda 5	347.294.745 suara / 95,5 %	16.424.600 suara / 4,5 %	-

7. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Agenda Pertama**
 - 1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (Ernst and Young), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - 2) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk diantaranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan, termasuk kepada para Direksi yang telah mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 9 Februari 2015, yaitu Bapak Agustinus Hambadi dan Bapak Djatikusumo Subagio, atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian tersebut.
- Agenda Kedua**
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp104.689.676.893 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp42 setiap saham atau sebesar kurang lebih 20% dari laba bersih Perseroan, yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2015;
 - 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
 - 3) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Agenda Ketiga**
 - 1) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.
 - 2) Menetapkan pemberian honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2016, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Agenda Keempat**
Memberikan wewenang kepada Direksi dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
- Agenda Kelima**
Merubah ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf b, pasal 4 ayat 3 huruf e, pasal 11, pasal 12 ayat 6, pasal 12 ayat 7, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat 7, pasal 15 ayat 8, pasal 16, pasal 17 ayat 3, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat 1, pasal 23, pasal 24 ayat 2, pasal 26 ayat 4, pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 5.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilakukan sehubungan dengan adanya peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, yaitu antara lain:
 - 1) Peraturan OJK No. 32,
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
 - 3) Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego	13 April 2015
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego	16 April 2015
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	20 April 2015
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	22 April 2015
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date)	20 April 2015
Tanggal Pembayaran	4 Mei 2015

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
 2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 April 2015 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
 3. Pembayaran Dividen Final:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fiskal), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, paling lambat tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
 - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
 5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Sinartama paling lambat tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
 1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.
- Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/ diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.